Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026

Kode Satker : 991223

Nama Pemda : Kab. Brebes

Verifikator :

A. Target Makro

Uraian	Nilai Target	Nilai Input	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	5,60-6,40	5.60-6.40	-
Tingkat Kemiskinan	14,41-13,78	6.5 - 7.5	-

B. Penyelarasaan Narasi KUA

Uraian	Keterangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	-
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	-
Ketahanan Pangan (Perikanan)	-
Ketahanan Pangan (Pertanian)	-
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	-
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	-

C. Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Belum ada data.		

D. Mandatory Spending

Uraian	KUA (2026)	Persen KUA	Keterangan
Mandatory Spending			
PDRD			

Lampiran 2

Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	• Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah; • Meningkatkan belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi sektor andalan dalam rangka perluasan market dan kapasitas industri; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; • Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan; • Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; • Optimaliasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	none	Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. (halaman 7) - Pertumbuhan Ekonomi (5.60-6.40%) (halaman 9) - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. (Halaman 15) - Berdasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 sebesar 5.60-6.40 persen dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2021-2024, kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah maka pendapatan daerah kabupaten brebes tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 3.720.298.677.752,00. (Halaman 19)	-
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/ RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.	none	- Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga (Halaman 22)	-

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Perikanan)	• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Mengembangkan industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; • Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas perikanan; • Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	none	- Indeks Ketahanan Pangan 80.00 (halaman 9)	-
Ketahanan Pangan (Pertanian)	• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting; • Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian.	none	- Indeks Ketahanan Pangan 80.00 (halaman 9)	-
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet; • Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	none	- Tingkat Kemiskinan 6,5 – 7,5 (Halaman 12) - Salah satu strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, konektivitas antar wilayah, peran stakeholder, konvergensi anggaran dan konsolidasi program. (Halaman 14)	-

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	KUA PPAS Kab/Kota	Rekomendasi
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	none	- Pemenuhan Mandatory Spending sektor pendidikan paling sedikit 20% (Halaman 23)	-

Lampiran 3

Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Indeks 1: Referensi

Klasifikasi	Jumlah Subkegiatan di Referensi	Jumlah Subkegiatan di PPAS	Skor
Belum ada data.			

Indeks 2: Unit Cost

	Anggaran	Penduduk	Unit Cost
Belum ada data.			

Indeks 3: Budget Optimizer

Intervensi	Aktual	Ideal	Deviasi
Belum ada data.			

Evaluasi

Skor Indeks	Keterangan
Belum ada data.	

Lampiran 4

Mandatory Spending

Jenis	KUA	Total Belanja	Persen KUA	Batasan	Catatan
Belum ada data.					

PDRD

Jenis	KUA	Total Pendapatan	Nilai Minimal KUA	Persen KUA	Batasan	Catatan
Belum ada data.						